



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKARNAIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG
3. NHK : 549950

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 125.000.000
1. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 123.500.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA / MINI BUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
 2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
 3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
 4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
 5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
 6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
 7. MOTOR, HONDA SEPADA MOTOR SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 65.100.000
- D. SURAT BERHARGA** Rp. ----
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.304.252.228



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.617.852.228

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.617.852.228

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.